

1. Panitia Pembebasan Tanah dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan kecuali ?
 - a. pemeriksaan/penelitian
 - b. penetapan ganti rugi
 - c. Memberikan ganti kerugian
 - d. Penafsiran harga tanah
2. Pembentukan panitia di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 ditetapkan oleh?
 - a. Gubernur
 - b. Bupati / walikota
 - c. Menteri dalam negeri
 - d. Gubernur dengan Mendagri
3. Di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 Jenis hat yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi dapat berupa :?
 - a. Semua jenis hat
 - b. Semua tanah yang sudah di kuasai
 - c. semua tanah yang sudah terdaftar
 - d. Tanah dari masy hukum adat
4. Di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, bagaimana Jika terdapat perbedaan taksiran ganti rugi di antara para anggota Panitia ?
 - a. Harga yang tertinggi
 - b. yang digunakan adalah
 - c. Harga terendah
 - d. Harga kesepakatan panitia dgn masy harga rata-rata dari taksiran anggota.
5. Bagaimana sikap panitia pembebasan tanah Di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, bila ada penolakan dari masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah ?
 - a. Tetap pada putusan semula
Atau meneruskan kepada Gubernur
 - b. Musyawarah kembali pd masyarakat
 - c. Mengadakan penafsiran ulang
 - d. Menyerahkan keputusan pd Bupati
6. Di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, kapan pelepasan hak atas tanah dilakukan ?
 - a. Pada saat terjadi kesepakatan keberatan
 - b. Setelah pembayaran gati kerugian
 - c. Setelah tidak ada yang keberatan
 - d. Bersamaan pembayaran ganti rugi
7. Di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, ditujukan kepada siapa permohonan hak atas tanah dari instansi yang memerlukan tanah ?
 - a. KMNA/BPN
 - c. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya

- b. BPN RI d. Penafsiran harga tanah
8. Pernyataan ini yang tidak benar di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, tentang uang honorium Para anggota dan Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah adalah ?
- a. $\frac{1}{4}$ % dari jumlah harga taksiran ganti rugi c. **Maksumum 1 %**
 b. Untuk seluruh anggota maksimum sebesar $1\frac{1}{2}$ % d. Rp 1.000.000
9. Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas, dan mengakibatkan perpindahan penduduk di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975, kewajiban apa yang harus disediakan ?
- a. Ganti rugi yang layak c. Biaya relokasi
 b. **Tempat penampungan pemukiman baru** d. Uang kompensasi
10. Apabila dalam hal pengadaan tanah diperlukan peninjauan lokasi, biaya transport/operasional dan biaya-biaya lainnya menjadi beban siapa menurut PMDN No. 15 Tahun 1975 ?
- a. Instansi yang memerlukan tanah c. Panitia pembebasan tanah
 b. Pemerintah daerah d. **Pemimpin Proyek**
11. Panitia Pembebasan Tanah di dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan kecuali ?
- a. pemeriksaan/penelitian c. **Memberikan ganti kerugian**
 b. penetapan ganti rugi d. Penafsiran harga tanah
12. Apa yang dimaksudkan dengan harga tanah harus memadai dalam PMDN Nomor 2 Tahun 1985 ?
- a. Harga pasar c. Harga yang berlaku di masyarakat
 b. Harga transaksi d. **Paling menguntungkan bagi negara**
13. Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Pemimpin proyek wajib memperhatikan ketentuan harga dasar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini dia atur dalam ?
- a. PMDN No. 2/1985 c. SE Mendagri No, 2/384/2/75
 b. **PMDN No. 15 Tahun 1975** d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961

14. Dalam PMDN Nomor 2 Tahun 1985, apabila dalam menentukan besarnya ganti rugi antara Pemimpin Proyek dan yang berhak atas tanah tidak terdapat kesepakatan, langkah apa yang akan diambil ?
- a. **Pemimpin Proyek segera mencari lokasi lain** c. Melakukan pencabutan hak
- b. Menyerahkan keputusan kepada Bupati d. Musyawarah kembali
15. Arti pengadaan tanah menurut Kepres 55 tahun 1993 adalah ?
- a. Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah c. **GR Kepada pihak terdampak**
- b. Dengan cara memberikan ganti kerugian tanah d. GR yang berhak atas tanah
16. Dalam kepres 55 tahun 1993 dasar pemberian Ganti kerugian pembebasan tanah adalah, berdasarkan ?
- a. Penilaian Aprial c. **Musyawarah**
- b. Harga Pasar d. NJOP yang berlaku
17. Dalam Kepres 55 tahun 1993 bagaimana penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- a. **Agar lebih efektif** c. Menghemat waktu
- b. Kesepakatan mudah tercapai d. Menghemat biaya
18. Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam Kepres 55 tahun 1993, siapa yang mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan tersebut ?
- a. Pelaksana pengadaan tanah c. Gubernur
- b. Penilai independen d. **Panitia pengadaan tanah**
19. Sesuai Kepres 55 tahun 1993 Siapa yang dapat mengeluarkan keputusan yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
- a. Pelaksana pengadaan tanah c. **Gubernur**

- b. Penilai independen
d. Panitia pengadaan tanah
20. Apabila keputusan itu tidak bisa di terima pihak yang berhak maka berdasarkan Kepres 55/93 agar kegiatan pengadaan tanah dapat terus berjalan maka dilakukan ?
- a. **Pencabutan HAT**
c. Penilaian ulang
- b. Musyawarah lanjutan
d. Konsinasi
21. Dalam Kepres 55 tahun 1993 untuk keadaan seperti apa penerapan Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dilakukan ?
- a. Bagi hasil tanah pertanian
c. Penguasaan tanah negara
- b. Sewa tanah pertanian
d. **Pengarapan tanpa ijin**
22. Pengadaan tanah menurut peraturan ini adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau
- a. Dengan Mendapatkan HAT
c. Dengan Pemindahtanganan HAT
- b. Dengan Pengambilalihan HAT
d. **Dengan pencabutan hak atas tanah.**
23. Apa yang membedakan pengertian pengadaan tanah dalam Perpres 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 Tahun 2006 dengan di hilangkannya ?
- a. Dengan Mendapatkan HAT
c. Dengan Pemindahtanganan HAT
- b. Dengan Pengambilalihan HAT
d. **Dengan pencabutan hak atas tanah.**
24. Dalam Perpres 65 Tahun 2006 musyawarah adalah usaha untuk mendapatkan kesepakatan tentang ?
- a. Dengan Mendapatkan HAT
c. Dengan Pemindahtanganan HAT
- b. Dengan Pengambilalihan HAT
d. **Dengan pencabutan hak atas tanah.**
25. Berapa lama waktu yang di alokasikan paling lam dalam proses musyawarah, sesuai dengan Perpres 65 tahun 2006 ?
- a. **120 hari**
c. 110 hari
- b. 100 hari
d. 130 hari.
26. Menurut Perpres 65 tahun 2006 apa yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah bila terjadi masalah dengan kegiatan musyawarah ?
- a. Menambah waktu musyawarah
c. 110 hari
- b. **Menetapkan bentuk dan besarnya ganti**
d. 130 hari.

27. Sesuai kewenangan menurut Perpres 65 tahun 2006 siapa yang dapat mengeluarkan keputusan mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan, kecuali ?
- a. Bupati/Walikota
 - b. Gubernur
 - c. Menteri Dalam Negeri
 - d. **Gubernur dengan persetujuan DPRD**
28. Menurut Perpres 65 tahun 2006 permintaan untuk melakukan pencabutan tanah tersebut disampaikan kepada Presiden oleh siapa ?
- a. Bupati/Walikota
 - b. Gubernur
 - c. Menteri Dalam Negeri
 - d. **Kepala BPN**
29. Menurut Perpres 65 tahun 2006 permintaan untuk melakukan pencabutan tanah ditandatangani siapa ?
- a. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD
 - b. **Menteri dari instansi yang memerlukan tanah, dan MENKUMHAM**
 - c. Menteri Dalam Negeri
 - d. Gubernur dan Ketua DPRD
30. Konsultasi publik dalam UU 2/2012 adalah proses ?
- a. Pendekatan persuasif
 - b. Sosialisasi kegiatan
 - c. **Komunikasi dialogis**
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat
31. Tujuan konsultasi publik dalam UU 2/2012 adalah untuk mencapai ?
- a. **Kesepahaman dan kesepakatan**
 - b. Dukungan masyarakat
 - c. Persetujuan masyarakat
 - d. Meminimalkan dampak sosial
32. Kesepakatan dan kesepahaman apa yang akan dicapai dalam konsultasi publik menurut undang-undang no 2 tahun 2012 ?
- a. Persiapan PTUP
 - b. **Perencanaan PTUP**
 - c. Pelaksanaan PTUP
 - d. Kegiatan PTUP
33. Ada berapa prinsip-prinsip Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang undang ini secara garis besar ?
- a. **4 Prinsip**
 - b. 3 Prinsip
 - c. 5 Prinsip
 - d. 6 Prinsip
34. Melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi: persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

- pelaksanaan pengadaan tanah; penyerahan hasil pengadaan tanah; dan pelaksanaan pembangunan; hal ini di atur dalam ?
- a. **Permenkeu 10/02.PMK/2015** c. Permendagri No. 72 Tahun 2012
 b. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 d. UU 2 Tahun 2012
35. Kebijakan pengadaan tanah di dalam masa transisi adalah kegiatan sebelum UU 2/12 di berlakukan, sedangkan kegiatan pengadaan tanah sudah berjalan tetapi belum selesai, apa yang di lakukan ?
- a. Di berhentikan dan di ulang c. Diadakan Penyesuaian
 b. Di lanjutkan dgn uu yang baru d. **Tahapan yang sudah di lakukan tetap di pakai dan di lanjutkan dengan UU yang baru**
36. Asas kemanusiaan dalam proses pengadaan tanah adalah perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional artinya ?
- a. **Perlakuan secara manusiawi dalam PTUP** c. Penggantian UGR yang layak
 b. penetapan ganti rugi d. Musyawarah yang adil
37. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah jaminan yang layak dalam pemberian penggantian kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat ?
- a. Memperoleh UGR Yang layak c. Memperoleh hak yang adil
 b. manfaat PTUP d. **Melangsungkan kehidupan yang lebih baik**
38. Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kemandirian dalam arti luas bahwa kegiatan pengadaan tanah harus memberikan dampak yang baik bagi kehidupan ?
- a. Masyarakat yang berhak c. Masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak
 b. Masyarakat terdampak d. **Masyarakat yang berhak dan masyarakat sekitar**

39. Yang dimaksud dengan asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum kepada siapa ?
- Pemerintah dan pihak yang berhak
 - Pemerintah dan masyarakat
 - Yang memerlukan tanah dan masyarakat
 - Pemerintah, yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak
40. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah, apa kelemahan asas ini ?
- Membuka peluang spekulasi
 - Susah mencapai kesepakatan
 - Memperbesar biaya operasional
 - Merepotkan pelaksana
41. Yang dimaksud dengan asas kesepakatan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Cara memperoleh tanah yang sudah dihakki seseorang harus dilakukan melalui kata sepakat antara pihak yang bersangkutan. Asas ini menekankan bahwa prinsipnya dalam pengadaan tanah tidak diperbolehkan adanya paksaan secara sepihak agar empunya meyerahkan tanah miliknya, asas ini kontradiksi dengan dengan kegiatan pengadaan tanah pada saat ?
- Penetapan bentuk ganti rugi
 - Konsultasi publik
 - Konsyinas
 - Penetapan lokasi
42. Yang dimaksud dengan asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai kegiatan pembangunan. Keikutsertaan dalam pengadaan tanah akan terjadi apabila masyarakat, kegiatan ini di lakukan pada saat, kecuali ?
- Konsyinas
 - Sosialisasi
 - Konsultasi publik
 - Pengumuman daftar nominatif
43. Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan ?
- memberikan UGR Yang banyak
 - Kesejahteraan yang tinggi

- b. **Nilai tambah** d. Kehidupan yang lebih baik
44. Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan harus dapat, kecuali ?
- a. **Teratur dan terukur** c. berkesinambungan
b. untuk mencapai tujuan yang diharapkan d. berlangsung secara terus-menerus
45. Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat . kecuali ?
- a. Dengan kepentingan masyarakat c. **Dengan kepentingan instansi yang memerlukan tanah**
b. Dengan kepentingan negara d. Seimbang dan sejalan
46. Pada tahapan perencanaan pelaksana pengadaan tanah dilakukan oleh ?
- a. **Instansi yang memerlukan tanah** c. Pelaksana pengadaan tanah
b. Konsultan d. Pemerintah daerah
47. Dalam dokumen perencanaan terdapat perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, menguraikan waktu yang diperlukan untuk masing masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, tahapan apa saja itu, kecuali ?
- a. **Perencanaan** c. Pelaksanaan
b. Persiapan d. Penyerahan hasil
48. Dalam kegiatan apa penerapan asas keterbukaan dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah ?
- a. **Survei sosial ekonomi** c. Perkiraan nilai tanah
b. Kelayakan lokasi d. Analisis biaya dan mafaat
49. Adapun tugas Tim Persiapan pengadaan tanah ini antara lain, kecuali ?
- a. Melaksanakan Konsultasi Publik c. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan
b. Melaksanakan pendataan awal d. **Melaksanakan Musyawarah GR**
50. Pihak mana saja yang diundang dalam pemberitahuan awal ?
- a. Masyarakat yang berhak c. Masyarakat terdampak
b. Tokoh masyarakat d. **Masyarakat yang berhak dan terdampak**
51. Pemberitahuan awal pembangunan di sampai dengan cara ?

- a. Pengumuman di lokasi c. Memuat di media cetak
b. Membuat selebaran d. **langsung dan tidak langsung**
52. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan. Data sementara ini digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan ?
- a. Sosialisasi c. Musyawarah ganti kerugian
b. **Konsultasi publik** d. Pemberitahuan awal
53. Tim persiapan harus dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa pembangunan tersebut benar-benar untuk kepentingan umum disamping itu memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat yang terdampak maupun masyarakat secara keseluruhan, apa yang ingin di capai dalam kegiatan ini ?
- a. **Kesepakatan dan kesepakatan** c. Maksud dan tujuan tersampaikan
b. Memberi kesempatan partisipasi d. Persetujuan masyarakat
54. Konsultasi publik merupakan titik kritis dalam kegiatan pengadaan tanah, mengapa ?
- a. Tidak bisa diulang c. **keberhasilan meringankan pekerjaan selanjutnya**
b. Dasar untuk Konsinyasi d. 80 % lebih harus sepakat baru bisa dilanjutkan
55. Dalam konsultasi publik, siapa yang menyampaikan maksud dan tujuan rencana pembangunan ?
- a. Pemerintah daerah c. Gubernur atau yang mewakili
b. **Instansi yg memerlukan tanah** d. Mendagri atau yang mewakili
56. Dalam konsultasi publik siapa yang menyampaikan, Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah ?
- a. **Pemerintah daerah Propinsi** c. Gubernur atau yang mewakili
b. Instansi yg memerlukan tanah d. Mendagri atau yang mewakili
57. Yang di sampaikan BPN dalam konsultasi publik adalah sebagai berikut, kecuali ?
- a. Peran penilai c. obyek yg dinilai ganti kerugian dan bentuk ganti rugi

- b. **Hak dan kewajiban pemilik tanah** d. insentif perpajakan
58. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan, Data sementara ini digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik, dalam daftar itu terkait dengan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, kalau bahan itu yang dipakai dalam konsultasi publik, bagaimana dengan pihak terdampak ?
- a. Di wakili tokoh” masyarakat c. Terwakili tapi tidak menyeluruh
b. Tidak diundang d. **Kurang terwakili yang seharusnya semua**
59. Siapa yang memberi rekomendasi kepada gubernur dan dapat menjadi dasar bagi gubernur untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penetapan lokasi pembangunan ?
- a. Badan Pengawasan Daerah c. Staf ahli Gubernur
b. Team konsultasi Publik d. **Tim Kajian Keberatan**
60. Dalam melakukan kewenangan pengadaan tanah akan membuat team untuk membantunya, berapa team yang di buat Gubernur ?
- a. 1 team c. **2 team**
b. 3 team d. 4 team
61. Berdasarkan pada laporan tim persiapan terkait keberatan masyarakat, Tim pengkajian keberatan melakukan tugasnya sebagai berikut, kecuali ?
- a. **Melaporkan hasil kajian** c. Melakukan pertemun dan klarifikasi
b. Inventarisasi masalah d. Membuat rekomendasi
62. Dalam tatapan persiapan, pada kegiatan apa partisipasi masyarakat dapat dilakukan, Kecuali ?
- a. Pendataan awal c. Pengajuan keberatan
b. Konsultasi publik d. **Pemberian rekomendasi**
63. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ?
- a. **Pemberian rekomendasi** c. Pengajuan keberatan
b. Konsultasi publik d. Pendataan awal
64. Pada kegiatan apa penerapan asas kesepakatan dalam proses persiapan pengadaan tanah dilakukan ?

- a. Pemberitahuan awal c. Pengajuan keberatan
b. **Konsultasi publik** d. Pendataan awal
65. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
- a. 1 alasan c. **2 alasan**
b. 3 alasan d. 4 alasan
66. Apa yang menjadikan dasar bagi penilai pertanahan untuk melaksanakan penilaian dalam kegiatan pengadaan tanah ?
- a. Peta bidang tanah c. Peta bidang tanah dan daftar nominatif
b. Daftar nominatif d. **BA pengesahan peta bidang dan daftar nominatif**
67. Dalam kegiatan pengadaan tanah berdasarkan UU 2/2012 biaya perkara di tanggung oleh siapa ?
- a. Pelaksana PTUP c. **Instansi yang memerlukan tanah, di
usulkan oleh pelaksana PTUP**
b. Instansi yang memerlukan tanah d. Gubernur
68. Penitipan Uang ganti kerugian ke Pengadilan (konsinyasi) dilakukan dalam keadaan seperti apa, kecuali ?
- a. Tidak terjadi kesepakatan GR c. **Permintaan Tanah pengganti belum
terrealisasi**
b. Pemilik tidak di ketahui d. Tanah masih dalam sengketa
69. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ? .
- a. Inventarisasi dan Identifikasi c. Pemberitahuan Besarnya Ganti
Kerugian
b. **Validasi** d. Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian
70. Dalam kegiatan apa penerapan asas keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah, kecuali ?
- a. Inventarisasi dan Identifikasi c. Pemberitahuan Besarnya Ganti
Kerugian
b. **Pengumuman** d. Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian
71. Pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah berdasarkan UU 2/2012, di lakukan di hadapan ?

- a. Kepala kantor pertanahan c. Bupati/Wali kota
 b. Instansi yang memerlukan tanah d. **Ketua pelaksana pengadaan tanah
 atau pejabat yang di tunjuk**
72. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun dokumen yang diserahkan antara lain dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi yang memuat ?:
- a. Peta bidang tanah c. **pengumuman dan hasil verifikasi**
 b. Daftar nominatif d. BA pengesahan peta bidang dan daftar nominatif
73. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun dokumen yang diserahkan antara lain dokumen musyawarah ganti kerugian yang memuat ?:
- a. **BA Kesepakatan dan Validasi** c. BA pelepasan & kwitansi pembayaran
 b. Daftar hadir dan kwitansi pembayaran d. Validasi & kwitansi pembayaran
74. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun dokumen yang diserahkan antara lain dokumen pembayaran ganti kerugian yang memuat ?:
- a. Daftar penerima UGR c. BA kesepakatan GR dan Kwitansi
 b. BA Kesepakatan dan BA pelepasan hak d. **BA pelepasan hak dan
 Kwitansi**
75. Siapa yang memberikan penjelasan tentang asas kemamfaatan adalah hasil pengadaan tanah ?
- a. Instansi yang memerlukan tanah c. **Kanwil Kemenkumham dan instansi
 yang memerlukan tanah**
 b. Pemda propinsi d. BPN

76. Untuk penyediaan tanah skala kecil, instansi pemerintah tidak memerlukan SK Penetapan Lokasi. Maka cara perolehan tanahnya dilakukan melalui, kecuali ?
- a. Jual beli
 - b. **Warisan**
 - c. Tukar menukarkan
 - d. Bentuk lain yang disepakati
77. Apa kelemahan memperoleh tanah secara langsung dengan para pemegang hak atas tanah ?
- a. Biaya mahal
 - b. Waktu yang lama
 - c. Kesepakatan sulit terjadi
 - d. **Tidak bisa dengan upaya Konsinyasi**
78. Mengapa dalam penagdaan tanah secara langsung tidak di mungkinkan upaya konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan ?
- a. Tidak ada konsultasi publik
 - b. Tanpa penilai independen
 - c. **Tidak memakai penetapan lokasi**
 - d. Tanpa proses peradilan
79. Permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan, untuk dapat diterbitkan sertipikat tanah sesuai dengan hak yang dapat di peroleh, hal itu bisa di lakukan setelah proses ?
- a. Perolehan tanah
 - b. Perolehan dan pelepasan HAT
 - c. **Tidak ada penetapan lokasi**
 - d. Tanpa proses peradilan
80. Dalam pengadaan tanah langsung ada keuntungan atau kelonggaran dalam melakukan musyawarah, hal ini di sebabkan karena instansi yang memerlukan tanah dalam mendapatkan hak atas tanah tidak
- a. Tidak ada konsultasi publik
 - b. Tanpa penilai independen
 - c. Tanpa proses peradilan
 - d. **Tidak dibatasi waktu**
81. Bagaimana kegiatan pelaksanaan pembngunan dalam pengadaan tanah dalam keadaan mendesak bila ada pihak yang mengajukan keberatan ?
- a. **Kegiatan pembangunan jalan terus**
 - b. Berhenti menunggu putusan PN
 - c. Berhenti dan bermusyawarah lagi
 - d. Di tunda sementara
82. Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum, apa yang di ganti rugi bila suatu tanah belum mempunyai alas hak atau masih di kategoerikan tanah negara
- a. Tanam tumbuh
 - b. Bagunan
 - c. **Kehilangan hak memanfaatkan tanah**
 - d. Tanam tumbuh besarta bangunan

83. Dalam asas keterbukaan dalam Pengadaan Tanah skala kecil dilakukan bila tanpa penetapan lokasi ?
- Pada saat musyawarah Pengambil alihan HAT
 - Pada saat konsultasi Publik
 - Penilaian GR
 - Saat sosialisai
84. Dalam asas keterbukaan dalam Pengadaan Tanah dalam keadaan mendesak dilakukan?
- Pada saat musyawarah Pengambil alihan HAT
 - Pada saat konsultasi Publik
 - Penilaian GR
 - Saat sosialisasi
85. Apa perbedaan akibat penetapan lokasi pada pengadaan tanah dalam keadaan mendesak dengan penetapan lokasi pada pengadaan tanah lainnya ?
- Pekerjaan langsung berjalan
 - Menunggu hasil gugatan kalau ada
 - tanpa dokumen perencanaan
 - Konsultasi publik lebih baik
86. Yang dimaksud dengan asas kesepakatan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Cara memperoleh tanah yang sudah dihakki seseorang harus dilakukan melalui kata sepakat antara pihak yang bersangkutan. Asas ini menekankan bahwa prinsipnya dalam pengadaan tanah tidak diperbolehkan adanya paksaan secara sepihak agar empunya meyerahkan tanah miliknya, asas ini kontradiksi dengan dengan kegiatan pengadaan tanah pada saat ?
- Penetapan bentuk ganti rugi
 - Konsultasi publik
 - Konsyinsi
 - Penetapan lokasi
87. Yang dimaksud dengan asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai kegiatan pembangunan. Keikutsertaan dalam pengadaan tanah akan terjadi apabila masyarakat, kegiatan ini di lakukan pada saat, kecuali ?
- Konsyinsi
 - Sosialisasi
 - Konsultasi publik
 - Pengumuman daftar nominatif
88. Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan ?
- memberikan UGR Yang banyak
 - Kesejahteraan yang tinggi

- b. **Nilai tambah** d. Kehidupan yang lebih baik
89. Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan harus dapat, kecuali ?
- a. **Teratur dan terukur** c. berkesinambungan
b. untuk mencapai tujuan yang diharapkan d. berlangsung secara terus-menerus
90. Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat . kecuali ?
- .a. Dengan kepentingan masyarakat c. **Dengan kepentingan instansi yang memerlukan tanah**
b. Dengan kepentingan negara d. Seimbang dan sejalan
91. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukn dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ?
- a. **Pemberian rekomendasi** c. Pengajuan keberatan
b. Konsultasi publik d. Pendataan awal
92. Pada kegiatan apa penerapan asas kesepakatan dalam proses persiapan pengadaan tanah dilakukan ?
- a. Pemberitahuan awal c. Pengajuan keberatan
b. **Konsultasi publik** d. Pendataan awal
93. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
- a. 1 alasan c. **2 alasan**
b. 3 alasan d. 4 alasan
1. Asas Kemanusiaan dalam proses pengadaan tanah adalah perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, B - S
 2. Asas Keadilan, jaminan yang layak dalam pemberian penggantian kepada pihak yang berhak. B - S
 3. Asas Kepastian, memberikan kepastian hukum tersediannya tanah dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. B - S
 4. Asas Keterbukaan, tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk

- memperoleh informasi. B- S
5. Asas Kesepakatan, dengan musyawarah para pihak tanpa dengan unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. B - S
 6. Asas Kesejahteraan, dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas. B- S
 7. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. B - S
 8. Tugas utama dari pemerintah adalah tidak menjamin tersediaanya tanah untuk pembangunan. B-S
 9. Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi. B - S
 10. Tujuan Pengadaan Tanah yang salah satunya untuk meningkatkan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. B – S